

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan penelitian sebagai berikut:

1. Hasil analisis deskriptif menunjukkan bahwa pengaruh variabel Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban, Partisipasi, Transparansi dan Akuntabilitas berada dalam kategori baik.
2. Hasil pengujian hipotesis pertama menunjukkan pengaruh perencanaan terhadap partisipasi menunjukkan nilai koefisien jalur sebesar 0,066 dengan nilai t sebesar 1.252 atau P Values 0,211. Nilai t tersebut lebih kecil dari t tabel (1,960). Hasil ini berarti bahwa perencanaan memiliki korelasi yang positif, tetapi tidak signifikan terhadap partisipasi, ditolak. Pengujian hipotesis pengaruh pelaksanaan terhadap partisipasi pembangunan desa menunjukkan nilai koefisien jalur sebesar 0,098 dengan nilai t sebesar 1,365 atau P Values 0,173. Nilai t tersebut lebih kecil dari t tabel (1,960). Hasil ini berarti variabel pelaksanaan memiliki korelasi yang positif tetapi tidak signifikan terhadap partisipasi, ditolak. Pengujian hipotesis pengaruh penatausahaan terhadap variabel partisipasi menunjukkan nilai koefisien jalur sebesar 0,004 dengan nilai t sebesar 0,096 atau P Values 0,924. Nilai t tersebut lebih kecil dari t tabel (1,960). Hasil ini berarti variabel penatausahaan memiliki korelasi yang positif tetapi tidak signifikan terhadap partisipasi, ditolak. Pengujian hipotesis pengaruh pelaporan dan

pertanggungjawaban terhadap variabel partisipasi menunjukkan nilai koefisien jalur sebesar 1,033 dengan nilai t sebesar 19,619 atau P Values 0,000. Nilai t tersebut lebih besar dari t tabel (1,960). Hasil ini berarti variabel pelaporan dan pertanggungjawaban memiliki korelasi yang positif dan signifikan terhadap partisipasi, diterima.

3. Pengujian hipotesis kedua menunjukkan pengaruh perencanaan pembangunan terhadap transparansi menunjukkan nilai koefisien jalur sebesar 0,232 dengan nilai t sebesar 1,748 atau P Values 0,081. Nilai t tersebut lebih kecil dari t tabel (1,960). Hasil ini berarti bahwa perencanaan pembangunan desa memiliki korelasi yang positif tetapi tidak signifikan terhadap transparansi, ditolak. Hasil pengujian hipotesis pengaruh pelaksanaan pengelolaan dana desa terhadap transparansi menunjukkan nilai koefisien jalur sebesar 0,359 dengan nilai t sebesar 2,043 atau P Values 0,042. Nilai t tersebut lebih besar dari t tabel (1,960). Hasil ini berarti bahwa pelaksanaan pengelolaan dana desa memiliki korelasi yang positif dan signifikan terhadap transparansi, diterima. Pengujian hipotesis pengaruh penatausahaan terhadap variabel transparansi menunjukkan nilai koefisien jalur sebesar 0,596 dengan nilai t sebesar 2,840 atau P Values 0,005. Nilai t tersebut lebih besar dari t tabel (1,960). Hasil ini berarti variabel penatausahaan memiliki korelasi yang positif dan signifikan terhadap transparansi, diterima. Pengujian hipotesis pengaruh pelaporan dan pertanggungjawaban terhadap variabel transparansi menunjukkan nilai koefisien jalur sebesar 0,511 dengan nilai t sebesar 2,296 atau P Values 0,022. Nilai t tersebut lebih besar dari t tabel (1,960). Hasil ini berarti bahwa variabel pelaporan

dan pertanggungjawaban memiliki korelasi yang positif dan signifikan terhadap transparansi, diterima.

4. Pengujian hipotesis ketiga menunjukkan bahwa pengaruh variabel Perencanaan terhadap Akuntabilitas menunjukkan nilai koefisien jalur sebesar 0,802 dengan nilai t sebesar 3,443. Nilai t tersebut lebih besar dari t tabel (1,960) atau P Values 0,000. Hasil ini berarti bahwa perencanaan pembangunan desa memiliki korelasi yang positif dan signifikan terhadap akuntabilitas, diterima. Pengujian hipotesis pengaruh pelaksanaan terhadap akuntabilitas menunjukkan nilai koefisien jalur sebesar 0,231 dengan nilai t sebesar 1,604 atau P Values 0,109. Nilai t tersebut lebih kecil dari t tabel (1,960). Hasil ini berarti variabel pelaksanaan pengelolaan dana desa memiliki korelasi yang positif tetapi tidak signifikan terhadap akuntabilitas, ditolak. Pengujian hipotesis pengaruh penatausahaan terhadap akuntabilitas menunjukkan nilai koefisien jalur sebesar 0,046 dengan nilai t sebesar 0,402 atau P Values 0,688. Nilai t tersebut lebih kecil dari t tabel (1,960). Hasil ini berarti bahwa variabel penatausahaan memiliki korelasi yang positif tetapi tidak signifikan terhadap akuntabilitas, ditolak. Selanjutnya Pengujian hipotesis pengaruh pelaporan dan pertanggungjawaban terhadap variabel akuntabilitas menunjukkan nilai koefisien jalur sebesar 0,745 dengan nilai t sebesar 2,392 atau P Values 0,017. Nilai t tersebut lebih besar dari t tabel (1,960). Hasil ini berarti variabel pelaporan dan pertanggungjawaban memiliki korelasi yang positif dan signifikan terhadap akuntabilitas, diterima.

## 5.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan hasil penelitian ini, maka dapat disarankan beberapa hal sebagai berikut ini :

Kepada Manajemen pengelolaan keuangan desa di wilayah Kecamatan Kakuluk Mesak Kabupaten Belu:

1. Penelitian ini fokus pada masalah utama yakni partisipasi, transparansi dan akuntabilitas. Hasil ini menjadi perdebatan dan novelty baru karena akuntabilitas pengelolaan keuangan desa memiliki aspek partisipasi dan transparansi, sehingga dapat dikembangkan untuk penelitian selanjutnya
2. Meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa dengan melakukan pelatihan secara terus menerus kepada seluruh aparatur pengelolaan keuangan desa tentang penggunaan aplikasi system keuangan desa / SISKEUDES kemudian dilanjutkan dengan menerapkan aplikasi tersebut dalam pelaksanaan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan desa.
3. Adanya keterbukaan pengelolaan dana desa yang ditandai dengan tersedianya informasi yang memadai, jelas dan akurat serta kemudahan akses bagi masyarakat untuk mendapatkan informasi tentang pengelolaan dana desa.
4. Memberikan pemahaman kepada masyarakat untuk terlibat aktif dalam proses pembangunan di desa mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan hingga pertanggungjawaban.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Abidin, 2015. *Indeks Kemandirian Desa: Metode, Hasil dan Alokasi Program Pembangunan*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Arikunto S. 1998. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Cetakan ke-11 Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Awaludin & Fahriza, R., (2019). “*Legislator: kurangnya pelatihan jadi tantangan pengelolaan dana desa*”,
- Budiantom E.E., (2019) “*Puluhan Warga di Mojokerto Protes Pengelolaan Dana Desa Tak Transparan*”.
- Bungin, Burhan. 2007. *Penelitian Kualitatif Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial Lainnya, Edisi kedua* (Cetakan keenam). Jakarta: Kencana, Prenada Media Group.
- Dwiyanto, Agus. 2002. *Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia*, Yogyakarta Galang Printika.
- Ferdinand, Augusty. 2014. *Metode Penelitian Manajemen*. Edisi ke-5 Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Fuad, Noor, dkk. 2004. *Dasar-dasar keuangan publik*. Jakarta: LPKPAP-Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan.
- Ghozali, Imam. 2006. *Structural Equation Modeling Metode Alternatif dengan Partial Least Square*, Semarang Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Halim, Abdul. 2007. *Akuntansi Sektor Publik*. Akuntansi Keuangan Daerah, Jakarta Salemba Empat.
- Halim, Abdul. 2012. *Manajemen Keuangan daerah*. Yogyakarta: UPT STIM YKPN
- Halim, Abdul. 2016. *Manajemen Keuangan Sektor Publik*. Jakarta: PT. Salemba Emban Patria
- Haryanto, Sahrudin, dan Arifuddin. 2007. *Akuntansi Sektor Publik*. Edisi Pertama: Semarang. Universitas Diponegoro.
- Hasniati, 2016. *Membangun Kekuatan Masyarakat*. Bandung: Puspaga.

- Kaho, Yosef Riwu. 1997. *Prospek Otonomi Daerah Di Negara Republik Indonesia*, Jakarta. PT. Gravindo Persada,
- Khusaini, Mohammad. 2006. *Ekonomi publik desentralisasi fiskal dan pembangunan daerah*. Malang: Badan Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya.
- Kasmir, 2008. *Analisis Laporan Keuangan*, Jakarta. Raja Grafindo Persada.
- Levis, Leta Ravael. 2013. *Metode Penelitian Prilaku Petani*, Maumere, Ledalero.
- Mahmudi. 2016. *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Yogyakarta
- Mardiasmo. 2002, *Otonomi Daerah dan Manajemen Keuangan Daerah*, Yogyakarta.
- Mardiasmo. 2004. *Otonomi dan manajemen keuangan daerah*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Mardiasmo. 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: penerbit Andi
- Moleong, Lexy J. 2002. *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung; Remaja Rosdakarya.
- Mulyadi, 2001. *Akuntansi Manajemen : Konsep, Manfaat dan Rekayasa*, Edisi Tiga, Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
- Nurcholis, 2011. *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Berbasis Partisipasi Masyarakat*. Malang: Setara Press.
- Riyanto, 2015. *Pengelolaan Keuangan Desa*. Bandung: Fokusmedia.
- Sabarnpo, 2007. *Akuntabilitas Konsep dan Implementasi*. Malang: UMM Press.
- Sukesi. 2007. *Akuntansi Desa*. Jakarta : Salemba Empat.
- Sulistiyani, Ambar Teguh. 2004. *Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan*, Yogyakarta: Gava media.
- Sulistiyani, A.T. 2011. *Memahami Good Governance: Dalam Perspektif Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta: Gava Media.
- Suwardjono, 2012. *Teori Akuntansi Perekayasaan Pelaporan Keuangan*. Edisi Ketiga, Yogyakarta: BPFÉ.
- Sujarweni, V. W. 2015. *Akuntansi Desa: Panduan Tata Kelola Keuangan Desa*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.

Widjaya, HAW. 2005. *Otonomi desa merupakan otonomi yang asli, bulat dan utuh*. Jakarta: PTRajawali Pers.

Waterston, Conyers. 1994. *Perencanaan Pembangunan Daerah Menuju Era Otonomi*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.

## **JURNAL**

Mardiasmo. 2006. *Pewujudan Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui Akuntansi Sektor Publik: Suatu Sarana Good Governance*, Jurnal Akuntansi Pemerintahan, Vol. 2, No. 1, Mei 2006, Hal 1 – 17

Aprisiami, Putriyanti. 2012. *Penerapan Otonomi Desa dalam Menguatkan Akuntabilitas Pemerintahan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat di Desa Aglik Kecamatan Grabag Kabupaten Purworejo*, Yogyakarta: UNY

Lembaga Administrasi Negara dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan RI 2000, *Akuntabilitas dan Good Governance, Modul 1-5, Modul Sosialisasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)*, LAN BPKP RI, Jakarta.

Nafidah, Lina Nasihatun 2014. *Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Jombang Tahun 2014*, STIE PGRI Dewantara Jombang

## **TESIS**

Benu, Simon Defri 2017. *Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Wilayah Kecamatan Amanuban Timur Kabupaten Timur Tengah Selatan Tahun 2016*. Tesis Pascasarjana Universitas Katolik Widya mandira Kupang.

Lestari, Sri. 2017. *Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) (Studi Kasus di Wilayah Kecamatan Banyudono)*. Skripsi. Institut Agama Islam Negeri Surakarta

Makalalag, Astri, Juanita. 2016. *Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Mobago Sselatan*. Tesis Pascasarjana Universitas Sam Ratulangi Manado

Putriyanti, Aprisiami 2012, *“Penerapan Otonomi Desa Dalam Menguatkan Akuntabilitas Pemerintah Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Aglik”*, Tesis S-2 Universitas Negeri Yogyakarta (tidak dipublikasikan).

Subroto, Agus 2009, *Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa*, Tesis S-2 Pascasarjana UNDIP Semarang (dipublikasikan).

## **UNDANG-UNDANG**

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang *Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*.

Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang *Desa*

Undang-undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang *Desa*

**PERATURAN PEMERINTAH**

Peraturan Pemerintah Nomor PP 43/2014. tentang *Peraturan Pelaksanaan UU 6/2014 dan PP 47/2015 tentang Perubahan atas PP 43/2014.*

**PERATURAN MENTERI**

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/2016. tentang *Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa.*

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 247/2015. tentang *Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa.*

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113/2014 tentang *Pengelolaan Keuangan Desa.*

Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang *Pedoman Pembangunan Desa*

Peraturan Menteri Desa Nomor 1 Tahun 2015 Tentang *Pedoman Kewenangan berdasarkan Hak Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa*

Peraturan Menteri Desa Nomor 5 Tahun 2015 Tentang *Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa*

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.07/2016 Tentang *Tatacara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa*

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang *Pengelolaan Keuangan Desa*